

Judul : Yang Main Anggaran Pemilu Pantas Dicap Penjahat Demokrasi
Tanggal : Sabtu, 12 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Yang Main Anggaran Pemilu Pantas Dicap Penjahat Demokrasi

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan semua pihak agar tidak bermain dengan anggaran Pemilu 2024. Apalagi, menggantungnya demi siasat menunda pesta demokrasi. Pelakunya pantas disebut penjahat demokrasi.

"Siapa yang mencoba bermain anggaran Pemilu untuk penundaan adalah kejahatan," tegas Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Anggota Komisi II DPR ini mengatakan, seluruh anggaran untuk penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), sudah dibahas di DPR bersama Pemerintah, agar tidak menghambat penyelenggaraannya.

Seperti diketahui, gelaran Pemilu 2024 sudah ditetapkan pada 14 April 2024. Jika dihitung mundur, agenda awal pesta demokrasi itu adalah pendaftaran parpol ke KPU pada Juni 2022. Setelah itu, dilanjutkan dengan verifikasi administrasi faktual untuk parpol calon kontestan Pemilu.

Konon, anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 76 triliun itu belum dicairkan. Gegara hal ini, banyak pihak yang khawatir, karena bisa berdampak kepada persiapan Pemilu 2024.

"Anggaran KPU seingat saya sudah dibahas. Tapi karena saat itu belum ada keputusan kapan Pemilu, memang belum memasukkan anggaran Pemilu 2024," sebutnya.

Mardani memastikan, PKS akan memperjuangkan anggaran itu cair dan tidak mengganggu penyelenggara Pemilu, demi menciptakan pesta demokrasi yang berkualitas.

"Nanti dalam pembahasan APBN 2022 pada April mestinya bisa dibahas secara bersama," tekannya.

Politisi asli Betawi ini menilai, ada yang perlu disepakati bersama tentang teknis peserta demokrasi. Di antaranya, tentang upaya mempersingkat waktu kampanye dan penggunaan informasi dan teknologi atau IT

untuk rekapitulasi suara.

"KPU baru diminta mengexercise ini. Semuanya bisa mempengaruhi besaran anggaran KPU Tahun 2022," pungkasnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mendesak Pemerintah segera mencairkan dana Pemilu 2024.

"Bentuk ketegasan ya anggaran Pemilu harus siap. Karena tahapan Pemilu akan segera dimulai. Sementara, saat ini masih ada perdebatan terkait dengan anggaran Pemilu. Karena dianggap terlalu besar, tidak ada uangnya," ujar Khoirunnisa kepada *Rakyat Merdeka*.

Perempuan yang akrab disapa Ninis ini menyarankan, kalau pun harus dilakukan penghematan, bisa didiskusikan bagian agar Pemilu tetap berjalan lancar.

"Kalau uang juga belum ada, tentu akan kesulitan dalam menyelenggarakan Pemilu," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno mengamini anggaran Pemilu 2024 belum disepakati Pemerintah, DPR dan KPU.

"Belum ada pembahasan lagi dengan DPR dan Pemerintah. Kami di KPU menunggu pembahasan tersebut," ujar Bernad, Selasa (8/3).

Adapun anggaran Pemilu yang diajukan KPU yaitu sekitar Rp 76 triliun dari semula Rp 86 triliun. Rinciannya, sekitar 81,84 persen anggaran digunakan untuk kegiatan tahapan yang di antaranya meliputi honor badan *ad hoc*, logistik, dan pemutakhiran data pemilih.

Kemudian, 18,16 persen anggaran digunakan untuk kegiatan dukungan tahapan. Kegiatan tersebut, di antaranya pembangunan atau renovasi gedung kantor dan gudang arsip Pemilu, gaji pegawai KPU dan belanja operasional kantor KPU se-Indonesia. ■ BSH